

## GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS

Tgl/Bln/Thn : 08/01/2009

Subyek :

Hari : Kamis

Kata Kunci :

Halaman : 13

### **Pengamanan Laut Terkendala Hukum**

Teknologi satelit dengan sistem radar kini dikembangkan untuk berbagai misi, baik untuk pemantauan lingkungan, navigasi, dan pertahanan. Norwegia mewujudkan dalam bentuk Multimission Earth Observation Systems, sedangkan Jepang mengembangkan sistem integrasi citra satelit.

Sekretaris Menko Kesra Indroyono Susilo yang juga pakar pengindraan jauh mengatakan, penerapan iptek untuk mendukung pemantauan dan pengamanan laut sudah memadai, didukung sistem jejaring radar di darat maupun sistem pemantauan di udara. "Kendala yang dihadapi adalah tidak adanya payung hukum, kelembagaan dan masih kuatnya egosektoral," ujarnya.

Untuk mengatasinya, menurut Indroyono, perlu pendekatan top-down, antara lain penetapan kebijakan tingkat nasional, dan pendekatan bottom-up berupa mobilisasi sumber daya, penyelenggaraan terintegrasi seperti operasi gurita, serta sosialisasi.

Hal itu mengemuka dalam Focus Groups Discussion optimalisasi Satelit Observasi Bumi untuk perlindungan lingkungan dan survei maritim, Rabu (7/1) di Jakarta.

Selain Indroyono, tampil Toto Marnanto Kadri (Lapan), Fahmi Amhar (Bakosurtanal), M Rudi Wahyono (Kongsberg Spacotec Indonesia), Nani Hendiarti (BPPT), Edvin Aldrian (BPPT), dan Aryo Hanggono (Badan Riset Kelautan dan Perikanan).

Menurut Nani Hendiarti, Chief Engineer Program Remote Sensing Hyperspectral di Pusat Pengkajian dan Penerapan TISDA (Teknologi Inventarisasi Sumber Daya Alam) BPPT, sejak 1999 hingga 2001 liputan satelit Envisat menunjukkan, rata-rata setahun wilayah Indonesia 70 persen tertutup awan. "Cuaca relatif cerah hanya Juni hingga September," ujarnya.

Masalah ini dapat diatasi dengan satelit dari Tohoku University Jepang. Penggabungan data citra satelit dengan teknik analisis obyektif menghasilkan citra suhu muka laut dengan resolusi 5 km.

"Saat ini tengah dikembangkan kemampuan sistem satelit generasi baru dengan resolusi 1 km dan kecepatan tampilan hasil analisisnya dari 12 jam menjadi 6 jam," ujarnya.

"Untuk memantau wilayah perairan Indonesia, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) merencanakan penggunaan Multimission Earth Observation Systems, dikembangkan Norway Space Center dan NATO sejak 1990-an," kata Rudi.